

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi di Indonesia mengamanahkan adanya kebebasan yang seluas-luasnya untuk masyarakat seperti kebebasan berpendapat atau *freedom of expression*, mendapatkan penghidupan yang layak, kemerdekaan memeluk agama, dan memperoleh akses pendidikan (UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31). Walaupun demikian, kebebasan dalam demokrasi bukan berarti kebebasan tanpa batas dan cenderung anarki. Sebab kebebasan tanpa batas cenderung tidak memenuhi supremasi hukum. Padahal secara nyata demokrasi syarat utamanya adalah harus berdiri pada supremasi hukum. Demokrasi tanpa supremasi hukum adalah bentuk kebohongan yang dapat memicu pola kehidupan rimba, sehingga yang kuatlah menjadi penguasa.

Demi tercapainya kreatifitas warga negara sebagai basis dalam sumber daya politik, pemindahan nilai-nilai hukum, moral, keyakinan yang dianut, pengetahuan teknologi dan warisan-warisan benda budaya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia paling tidak memerlukan peranan partai politik untuk membentuk sikap demokrasi dikalangan warga negara.

Kehidupan partai politik di Indonesia mulai dikenal sejak adanya Maklumat X Wakil Presiden Tahun 1995 yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh partai politik. Maklumat ini awalnya bercirikan adanya penyimpangan terhadap UUD NRI 1945 yaitu dalam pengakuannya menganut sistem pemerintahan Presidensial namun pada prakteknya berlaku sistem parlementer.

Menurut UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan partai politik adalah “organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945”.

Keberadaan partai politik sangat dibutuhkan bagi negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Partai politik di Indonesia merupakan salah satu institusi inti dari demokrasi konstitusional. Demokrasi yang dalam pengertian bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Demokrasi ini menawarkan sebuah sistem yang disebut keterwakilan, baik keterwakilan lembaga formal kenegaraan seperti parlemen maupun aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian.

Masyarakat tentunya mengenal demokrasi melalui pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik. UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (4) tentang partai politik, menyatakan bahwa pendidikan politik adalah “proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Ini merupakan salah satu fungsi partai politik dalam pendidikan wawasan kebangsaan, selain mengadakan sosialisasi dan pelatihan lainnya. Namun yang menjadi permasalahannya saat ini, pelaksanaan pendidikan politik tidak dirasakan oleh sebagian besar masyarakat.

Dampak yang dihasilkan dari permasalahan di atas ialah terjadinya pola hidup masyarakat yang instan, bermalas-malasan dan tidak mau tahu tentang pemerintahan dan lingkungannya. Bahkan dampak yang terlihat jelas adalah

adanya kesenjangan sosial akibat sikap materialistis dan pragmatis-oppurtunis. Juga dengan pemikiran sempit, meningkatnya tingkat pengangguran di daerah tersebut. Tidak jauh berbeda dengan masyarakat di Kelurahan Sidorejo Hilir.

Pemahaman terhadap demokrasi tidak sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat di Kelurahan Sidorejo Hilir. Dalam negara demokratis dikenal “*one man one vote*” yang berarti diberinya kebebasan untuk memilih siapa saja. Memang masyarakat di Kelurahan Sidorejo Hilir menggunakan hak pilihnya, namun hak pilih yang digunakannya harus sama dengan pihak yang dominan. Contohnya pengaruh dari keluarga, jika terdapat salah satu anggota keluarga yang tidak memilih yang sama dengan anggota lainnya, maka akan dikucilkan oleh keluarga tersebut. Biasanya hal ini disebabkan faktor pendidikan, ekonomi, dan status sosial. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas maka PDI-P hadir di tengah masyarakat.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) merupakan salah satu partai dominan di Indonesia. Partai yang mendeklarasikan dirinya sebagai partainya *wong cilik* ini menganggap bahwa pandangan visi dan misi mereka berbeda dari partai politik lainnya. Mengaku hadir sebagai bagian rakyat dan tidak hanya sebagai suatu bentuk formalitas dari partai lainnya. PDI-Perjuangan yang dipimpin oleh Ibu. Hj. Megawati Soekarno Putri, telah berkembang di seluruh daerah termasuk Kota Medan yang berada di provinsi Sumatera Utara.

Sebagai salah satu partai dominan PDI-Perjuangan memiliki peran penting dalam memberikan pengaruh dan fungsi politik kepada masyarakat Kota Medan. Banyak masyarakat saat ini mengenal dan mengetahui partai tersebut.

Terutama ketika awal tahun 1999 partai yang dipimpin oleh Hj. Megawati Soekarno Putri ini memenangkan suara pemilihan umum di urutan kedua dan menjadi presiden wanita pertama di tahun 2000 setelah turunya Alm. Abdurrahman Wahid.

Berdasarkan dari pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan kajian lebih lanjut terhadap pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Medan yang kemudian diangkat menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul “Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan”.

B. Identifikasi Masalah

Agar suatu penelitian lebih terarah dan jelas tujuannya maka perlu dijelaskan identifikasi masalahnya. Dengan demikian berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi identifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Sikap apatis kalangan masyarakat Kelurahan Sidorejo Hilir terhadap pemahaman pendidikan politik.
2. Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik.
3. Kurangnya sosialisasi pendidikan politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
4. Rendahnya koordinasi sistem kerja sama antara Pemerintah dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

C. Pembatasan Masalah

Salah satu hal yang penting dalam suatu penelitian adalah perlunya dibatasi permasalahan yang diteliti. Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas ada beberapa masalah yang muncul bisa diteliti:

1. Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik

D. Rumusan Masalah

Dari pengidentifikasian masalah di atas, juga mengingat keterbatasan penulis dalam memecahkan masalah satu per satu, maka penulis merumuskan masalah yang terjadi yaitu:

1. Bagaimanakah Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik?

E. Tujuan Penelitian

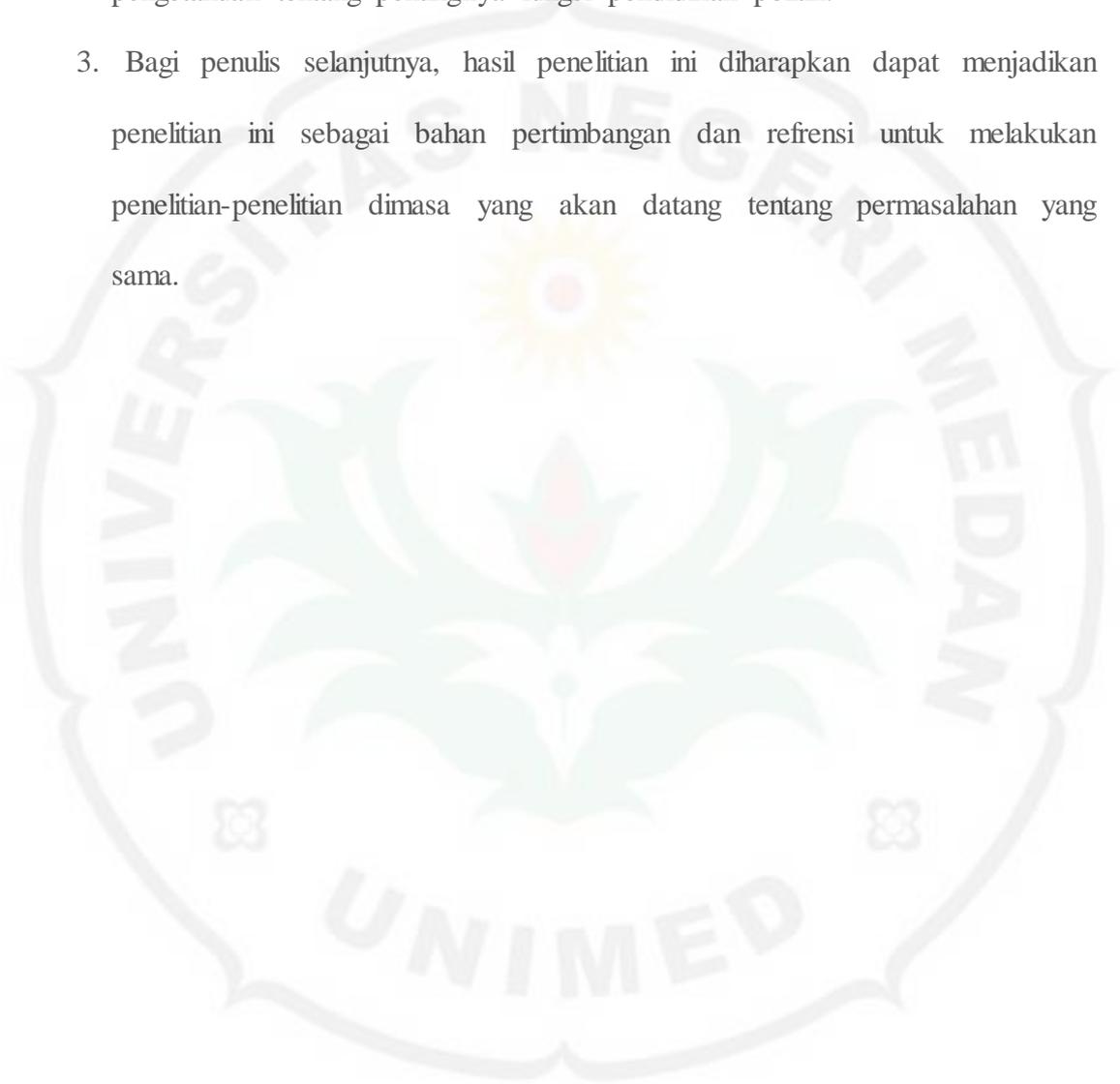
Sejalan dengan pembatasan masalah dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah dan partai politik, khususnya Pemerintah Daerah dan PDI-Perjuangan, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memahami fungsi pendidikan politik.

2. Bagi masyarakat, diharapkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya fungsi pendidikan politik.
3. Bagi penulis selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk melakukan penelitian-penelitian dimasa yang akan datang tentang permasalahan yang sama.



THE
Character Building
UNIVERSITY